

PENGARUH TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PKB DAN BBNKB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Mareta Rahmawati Putri¹, Fauziyah², Srikalimah³
^{1,2,3} Universitas Islam Kediri

¹maretarahmawatiputri@gmail.com, ²Fauziyah_rahman@ymail.com, ³srikalimah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Jawa Timur. Penting sekali mendorong pertumbuhan PKB guna meningkatkan kesejahteraan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara persial dan simultan efektivitas dan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Bersama SAMSAT Katang Kabupaten Kediri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Efektivitas PKB dan Efektivitas BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Sedangkan Kontribusi PKB dan Kontribusi BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Variabel bebas tersebut memiliki pengaruh sebesar 1 atau 100%. Sebaiknya KB Samsat Katang Kediri terus meningkatkan dan mempertahankan keefektifan PKB dan BBNKB melalui program program yang dimiliki seperti pemutihan dan lainnya, hal tersebut berguna mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mensejahterakan pendapatan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Local taxes, particularly Motor Vehicle Tax (Pajak Kendaraan Bermotor or PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor or BBNKB), play a pivotal role in augmenting the Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD) in East Java Province. The substantial growth of PKB is crucial for regional prosperity. This study aims to assess the partial and simultaneous effects of the effectiveness and contribution of PKB and BBNKB to PAD. Utilizing secondary data from the Joint Office of SAMSAT Katang in Kediri Regency (2020-2022), the research employs a quantitative descriptive model with documentation as the data collection method. Multiple linear regression is used for the analysis. Results indicate that the effectiveness of PKB and BBNKB significantly influences PAD, while the contribution of PKB and BBNKB does not have a significant impact. These variables exhibit a 1 or 100% influence. Recommendations include the continuous enhancement of PKB and BBNKB effectiveness through existing programs such as amnesty, vital for supporting PAD growth and regional prosperity.

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: Effectiveness, Contribution of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee, Regional Original Revenue.

PENDAHULUAN

Pajak di negara Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar dalam fungsi sebagai penerimaan negara. Fungsi tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan belanja suatu negara yang pada akhirnya akan digunakan sebagai pembangunan untuk pemerataan pembangunan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di negara tersebut. Pajak menjadi sektor penerimaan yang unggul, di mana di Indonesia dikatakan bahwa pajak berperan sebagai primadona dalam menentukan pendapatan negara (Sofyan 2016). Adanya pajak memberikan kontribusi pada pembangunan menyeluruh, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat secara luas, baik secara nasional maupun regional atau daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam undang-undang setiap wilayah atau daerah regional, menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah atau wilayah (Evi, 2021). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi atau pajak daerah merupakan pungutan yang diberikan kepada wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang berlokasi di suatu daerah. Pajak ini bersifat dipaksakan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Imbal balik atau balas jasa atas pajak tersebut tidak diberikan secara langsung, melainkan dalam bentuk fasilitas umum yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal mengenai pajak ini di bina sesuai dengan konsep perpajakan secara nasional, terutama mengenai objek pajak dan tarif pajak yang berlaku supaya pajak nasional dan pajak daerah tidak saling tindih dan saling melengkapi. (Sari, 2013)

Pendapatan Daerah, yang mencakup hak-hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode anggaran tertentu (Kumalasari et al., 2017). Pengenaan pajak daerah disetor oleh Kantor Bersama SAMSAT Katang Kabupaten Kediri kepada Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, kemudian dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, diperoleh melalui berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dikelola oleh Kantor Bersama SAMSAT. Kedua jenis pajak ini memainkan peran vital dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2022 menjadi provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia, mencapai 24,27 juta unit. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan transportasi yang terus meningkat menjadi faktor utama peningkatan jumlah kendaraan, yang pada gilirannya berkontribusi signifikan pada Pendapatan Daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB (Sadya, 2023).

Pungutan yang dikenal sebagai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan pada kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor (Sari, 2013). Kendaraan bermotor mencakup semua jenis kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan dijalankan oleh peralatan teknik seperti motor atau peralatan serupa. Fungsinya adalah untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai hasil dari perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau masuknya kendaraan ke dalam badan usaha. (Evi, 2021).

Pentingnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan keuangan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat disimpulkan bahwa peran ini memiliki kepentingan yang sangat krusial. Jika dilihat dari berbagai jenis Pajak Daerah, jenis pungutan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pungutan ini tidak hanya memainkan peran sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan ekonomi daerah. Strategi pengelolaan dan peningkatan efisiensi dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mencakup evaluasi terhadap tingkat efektivitas PKB dan BBNKB dalam mempengaruhi PAD, serta dampak kontribusi keduanya terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh secara simultan dari tingkat efektivitas PKB, efektivitas BBNKB, kontribusi PKB, dan kontribusi BBNKB terhadap PAD.

LANDASAN TEORI

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu pajak dalam golongan Pajak Propinsi. Penerapan PKB di tingkat provinsi bergantung pada peraturan daerah propinsi yang bersangkutan, dan pajak ini menjadi kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan daerah. Seiring meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor di Indonesia, penerimaan pajak daerah, khususnya PKB, ikut meningkat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan dasar pengenaan PKB, yang melibatkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasar umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya, dengan penyesuaian koefisien jika harga pasar umum tidak jelas. Bobot digunakan untuk mengukur kerusakan jalan atau polusi yang disebabkan oleh pemakaian kendaraan, dengan mempertimbangkan variabel seperti tekanan ganda dan jenis bahan bakar.

Tarif PKB diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan perincian tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Terdapat tarif khusus untuk kendaraan angkutan umum, alat berat, dan lembaga sosial. Hasil penerimaan PKB, sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) undang-undang tersebut, dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, melalui konsep *earmarking*.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, terutama akibat perjanjian jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Proses penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk pemasukan kendaraan dari luar negeri untuk penggunaan di daerah, dikenakan BBNKB, kecuali untuk penggunaan pribadi, perdagangan, ekspor, dan keperluan pameran atau penelitian. BBNKB dibagi menjadi dua jenis, yaitu BBNKB I untuk kendaraan baru dan BBNKB II untuk kendaraan bekas. Dasar pengenaan dan tarif BBNKB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, tarif BBNKB pada penyerahan pertama adalah sebesar 15%, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%. Untuk kendaraan alat berat, tarif BBNKB pada penyerahan pertama adalah 0,75%, dan pada penyerahan kedua dan seterusnya tetap 0,75%.

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB menjadi fokus penting, dengan efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil yang mencerminkan hubungan antara perpajakan dan potensi pajak. Untuk mengukur efektivitas, perbandingan dilakukan antara realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dengan target yang ditetapkan. Rumus efektivitas diukur sebagai persentase realisasi terhadap target. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, dengan fokus khusus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

$$\text{Efektivitas PKB} = \text{Realisasi PKB} \times 100\%$$

Target PKB

$$\text{Efektivitas BBNKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Target BBNKB}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Rizal and Hidayah (2018), kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama pada pihak lain dengan tujuan, biaya, atau kerugian tertentu. Suprpto (Khoiriyah and Puspita 2020) menjelaskan bahwa analisis kontribusi digunakan untuk menilai seberapa besar peran Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut. Rumus kontribusi PKB dan BBNKB dinyatakan sebagai persentase realisasi terhadap target PAD, di mana semakin besar nilai kontribusinya, semakin besar peran Pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi BBNKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang esensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, terutang oleh individu atau badan sesuai dengan Undang-Undang, digunakan untuk kemakmuran rakyat dan keperluan daerah. Pajak ini ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan dipungut oleh instansi pemerintah daerah yang berwenang. Pajak Daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, memiliki fungsi utama sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Kontribusi Pajak Daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor, memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dikembangkan.

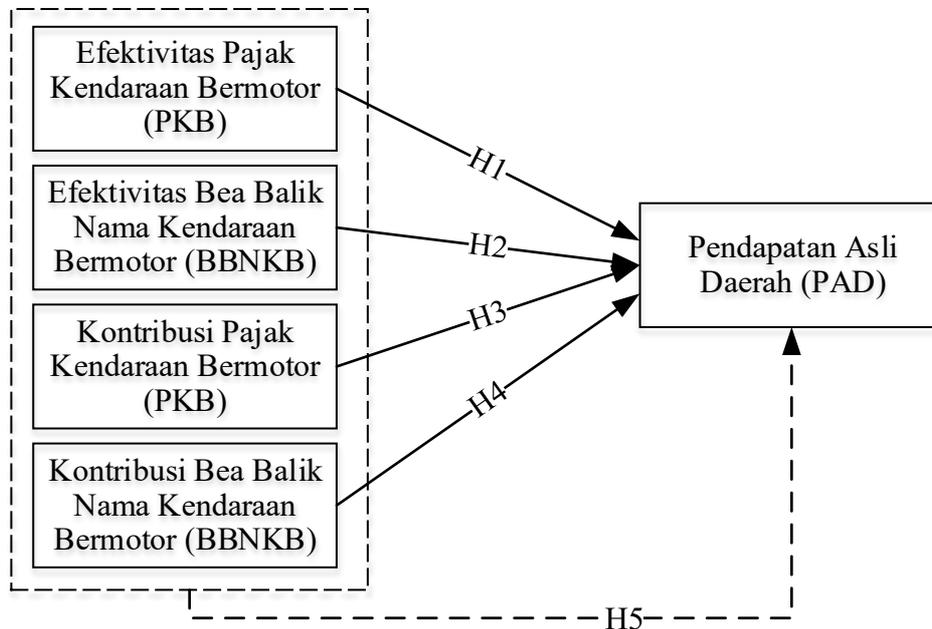
Sistem pemungutan pajak daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, melibatkan beberapa elemen seperti pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, penetapan oleh kepala daerah, dan pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak menerima surat tagihan pajak daerah sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti percetakan formulir perpajakan dan pengiriman surat-surat, dapat memudahkan proses pemungutan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengumpulkan sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Sumber-sumber PAD, seperti pajak daerah yang dikelola oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menjadi penopang utama dalam mencapai kemandirian keuangan daerah.

Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan menggunakan judul “Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap PAD di KB. SAMSAT Katang Kabupaten Kediri”. Adapun kerangka pikir yang disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1 Kerangka Teoritik

Keterangan :

- ▶ = Pengaruh secara parsial
- - - - -▶ = Pengaruh secara simultan

Dari kerangka diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa hubungan secara parsial dan simultan antara efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap peningkatan PAD serta kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh untuk meningkatkan PAD.

Hipotesis

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

Efektivitas PKB mengacu pada sejauh mana pemerintah Kabupaten Kediri berhasil dalam mengumpulkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak. Semakin besar pendapatan pajak kendaraan bermotor yang diterima maka akan semakin signifikan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Khoiriyah (2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas PKB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitin ini adalah “Diduga Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri”. Berdasarkan uraian tersebut maka formula hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut

Ho: Diduga Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Ha: Diduga Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

BBNKB adalah salah satu sumber penting pendapatan daerah, dan meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan pajak dari transaksi ini dapat secara langsung meningkatkan pendapatan daerah. Semakin banyak transaksi BBNKB yang berhasil dipantau dan dipungut, semakin besar kontribusinya terhadap PAD. Ketika pemilik kendaraan melihat bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berusaha keras untuk memastikan bahwa semua wajib pajak BBNKB membayar pajak secara tepat waktu dan benar, hal ini dapat memberikan insentif bagi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ini mengarah pada peningkatan dalam pemenuhan pajak dan, oleh karena itu, pendapatan yang lebih besar dari BBNKB.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maarontong, 2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan BBNKB membuat penerimaan daerah menjadi efektif. Berdasarkan hasil uraian dan penelitian terdahulu tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah "Diduga Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri" sebagai berikut:

Ho: Diduga Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Ha: Diduga Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

PKB adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Oleh karena itu, asumsi logisnya adalah semakin besar kontribusi PKB, semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh oleh Kabupaten Kediri dari sumber ini. Pertumbuhan PKB umumnya terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Semakin banyak kendaraan yang terdaftar, semakin banyak potensi sumber pendapatan dari pajak kendaraan. Oleh karena itu, pertumbuhan kendaraan bermotor dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari PKB terhadap PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khoiriyah (2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD sangatlah signifikan. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian "Diduga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri". Berdasarkan uraian tersebut maka disusun formulasi hipotesis sebagai berikut :

Ho: Diduga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

H3: Diduga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

BBNKB adalah salah satu sumber pendapatan daerah, dan memberikan kontribusi dalam mengumpulkan pajak dari transaksi ini dapat secara langsung meningkatkan pendapatan daerah. Semakin banyak transaksi BBNKB yang berhasil dipantau dan dipungut, semakin besar kontribusinya terhadap PAD. Ketika pemilik kendaraan melihat bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berusaha keras untuk memastikan bahwa semua wajib pajak BBNKB membayar pajak secara tepat waktu dan benar, hal ini dapat memberikan insentif bagi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ini mengarah pada peningkatan dalam pemenuhan pajak dan, oleh karena itu, pendapatan yang lebih besar dari BBNKB.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maarontong, 2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan BBNKB membuat penerimaan daerah menjadi efektif. Berdasarkan hasil uraian dan penelitian terdahulu tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah "Diduga Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri" sebagai berikut:

Ho: Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Ha: Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Pengaruh secara simultan tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PKB dan BBNKB merupakan sumber penting dalam perolehan sumber dana pemerintah dari pemungutan pajak, semakin efektif pembayaran pajak kendaraan bermotor dan semakin tinggi kontribusi yang dilakukan akan sangat mendorong pertumbuhan dari pendapatan asli daerah.

Uraian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maarontong, 2019) dan Nurul Khoiriyah (2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya BBNKB dan PKB mendorong Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis seperti "Diduga tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah". Berdasarkan uraian tersebut maka disusunlah formula hipotesis sebagai berikut :

Ho : Diduga tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha : Diduga tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terfokus pada tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan tujuan memberikan gambaran sebenarnya tentang objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Lokasi penelitian adalah Kantor SAMSAT Katang di Kabupaten Kediri, dipilih karena manajemennya bersifat terbuka dan memudahkan akses data. Populasi penelitian adalah target dan realisasi PKB dan BBNKB Kabupaten Kediri dari tahun 2020-2022. Sampel penelitian adalah data tersebut yang dibagi per bulan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, mengumpulkan data primer berupa studi literatur, dokumen resmi, dan laporan terkait perpajakan. Variabel-variabel yang digunakan meliputi tingkat efektivitas dan kontribusi PKB dan BBNKB sebagai variabel independent, sedangkan PAD sebagai variabel dependent. Efektivitas diukur dengan perbandingan realisasi dan target, sedangkan kontribusi dihitung sebagai persentase realisasi terhadap target PAD. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Parsial, Uji Simultan dan Koefisien Determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statiska Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) serta standar deviasi dari variabel penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan *Statistical Package For Social Science (SPSS) version 23.0*. Berikut peneliti sajikan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel yang peneliti teliti pada penelitian ini:

Tabel 1 Deskriptif Statisik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas PKB	36.00	18,972,990,400.00	36,833,262,350.00	28,161,866,503.08	4,081,276,447.58
Efektifitas BBNKB	36.00	6,442,116,400.00	18,440,467,500.00	12,523,185,988.89	2,557,206,460.47
Kontribusi PKB	36.00	1.05	1.16	1.1067	0.04561
Kontribusi BBNKB	36.00	1.19	1.22	1.2000	0.01434
PAD	36.00	27,504,359,900.00	51,863,044,300.00	40,919,163,879.19	5,430,947,530.34
Valid N (listwise)	36.00				

Sumber : Data Diolah 2023.

Berdasarkan tabel 1 di atas menampilkan data statistik dari empat variabel, yaitu Efektivitas PKB, Efektifitas BBNKB, Kontribusi PKB, Kontribusi BBNKB, dan PAD. Statistik deskriptif memberikan informasi tentang karakteristik dasar dari data, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Variabel Efektivitas PKB memiliki 36 observasi dengan nilai minimum sebesar 18,972,990,400.00 dan nilai maksimum sebesar 36,833,262,350.00. Rata-rata nilai Efektivitas PKB adalah 28,161,866,503.08, dan standar deviasi adalah 4,081,276,447.58. Variabel Efektivitas BBNKB juga memiliki 36 observasi dengan nilai minimum sebesar 6,442,116,400.00 dan nilai maksimum sebesar 18,440,467,500.00. Rata-rata nilai Efektifitas BBNKB adalah 12,523,185,988.89, dan standar deviasi adalah 2,557,206,460.47. Variabel Kontribusi PKB memiliki 36 observasi dengan nilai minimum sebesar 1.05 dan nilai maksimum sebesar 1.16. Rata-rata nilai Kontribusi PKB adalah 1.1067, dan standar deviasi adalah 0.04561.

Variabel Kontribusi BBNKB memiliki 36 observasi dengan nilai minimum sebesar 1.19 dan nilai maksimum sebesar 1.22. Rata-rata nilai Kontribusi BBNKB adalah 1.2000, dan standar deviasi adalah 0.01434. Variabel PAD juga memiliki 36 observasi dengan nilai minimum sebesar 27,504,359,900.00 dan nilai maksimum sebesar 51,863,044,300.00. Rata-rata nilai PAD adalah 40,919,163,879.19, dan standar deviasi adalah 5,430,947,530.34. Terdapat valid N (*listwise*) sebanyak 36, artinya tidak ada data yang hilang dalam tabel tersebut.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

Keterangan	Nilai <i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
N	36	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,815	

Sumber : Data Diolah 2023.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa distribusi data secara normal dan model regresi dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Hasil perhitungan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0.815, lebih besar dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis bahwa sampel berasal dari distribusi normal. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa data tersebut berasal dari distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

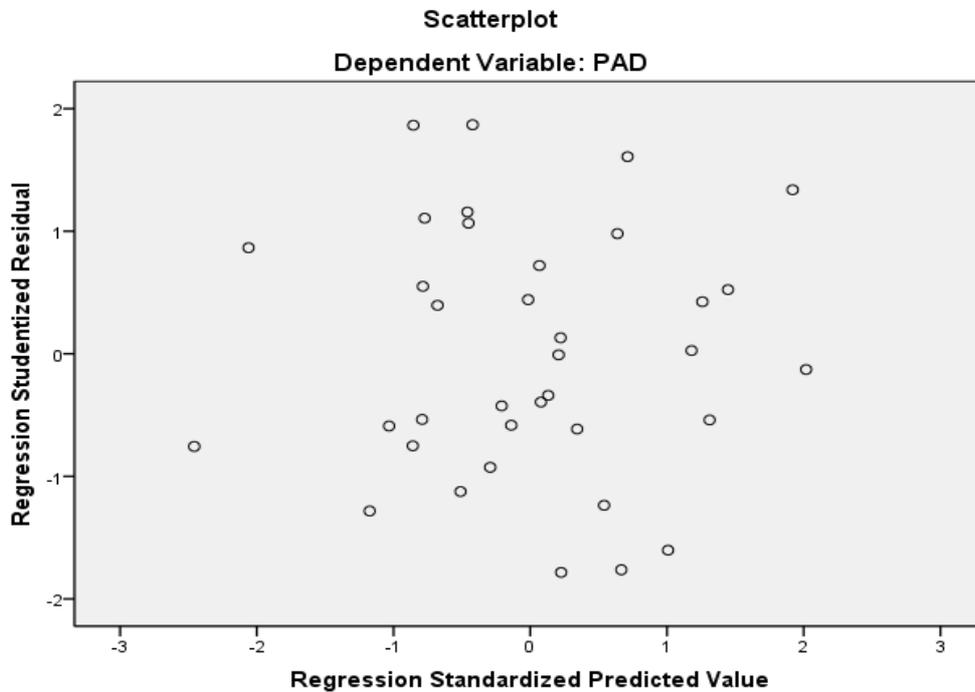
Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Keterangan	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Efektivitas PKB (X1)	0,798	1,254	Bebas Multikolinieritas
Efektivitas BBNKB (X2)	0,772	1,295	Bebas Multikolinieritas
Kontribusi PKB (X3)	0,159	6,297	Bebas Multikolinieritas
Kontribusi BBNKB (X4)	0,170	5,891	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Diolah 2023.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah 2023.

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan dalam penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji, sehingga asumsi ini terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Keterangan	Nilai <i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,128	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Diolah 2023.

Dapat dilihat pada tabel di atas, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0.128 > 0.05$ (level signifikansi yang umum digunakan), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis bahwa sampel terhindar dari gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	-1,881E9	-0,408	0,686
Efektivitas PKB	1,013	210,447	0,000
Efektivitas BBNKB	0,993	127,220	0,000
Kontribusi PKB	-8,313E7	-0,086	0,932
Kontribusi BBNKB	1,620E9	0,546	0,589

Sumber : Data Diolah 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar -1.881E9, artinya jika variabel independen dianggap konstan, maka PAD yang dihasilkan adalah sebesar -1.881E9.

- 2) Koefisien regresi *Efektivitas PKB (X1)* sebesar 1.013 menunjukkan bahwa jika *Efektivitas PKB* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menaikkan PAD sebesar 1.013 dan sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi *Efektivitas BBNKB (X2)* sebesar 0.993, artinya jika *Efektivitas BBNKB* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menaikkan besarnya PAD sebesar 0.993 dan sebaliknya.
- 4) Koefisien regresi *Kontribusi PKB (X3)* sebesar -8.313E7 menunjukkan bahwa jika *Kontribusi PKB* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menurunkan PAD sebesar -8.313E7 dan sebaliknya.
- 5) Koefisien regresi *Efektivitas BBNKB (X4)* sebesar 1.620E9, artinya jika *Efektivitas BBNKB* mengalami peningkatan sebesar 1 akan menaikkan besarnya PAD sebesar 1.620E9 dan sebaliknya.

Koefisien Determinasi

Tabel 6 Koefisien Determinasi

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square
1	1000 ^a	1000	1000

Sumber : Data Diolah 2023.

Diketahui bahwasanya pada persamaan *Rsquare* bernilai 1 atau 100% dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwasanya *Efektivitas PKB*, *Efektifitas BBNKB*, *Kontribusi PKB*, *Kontribusi BBNKB* berpengaruh sebesar 100%.

Uji T

Tabel 7 Hasil Uji T (test)

Variabel	Signifikansi	Standar Nilai	Keterangan
<i>Efektivitas PKB (X1)</i>	0,000	<0,05	Ha Diterima, Ho Ditolak
<i>Efektivitas BBNKB (X2)</i>	0,000	<0,05	Ha Diterima, Ho Ditolak
<i>Kontribusi PKB (X3)</i>	0,932	<0,05	Ha Ditolak, Ho Diterima
<i>Kontribusi BBNKB (X4)</i>	0,589	<0,05	Ha Ditolak, Ho Diterima

Sumber : Data Diolah 2023.

Dari tabel uji t di atas dapat diketahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas apakah benar-benar signifikan dalam menjelaskan variabel terikat dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Hasil menunjukkan bahwa *Efektivitas PKB (X1)* berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi *Efektivitas PKB (X1)* sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak dan Ha diterima.
- 2) Hasil menunjukkan bahwa *Efektivitas BBNKB (X2)* berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi *Efektivitas BBNKB (X2)* sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak dan Ha diterima.
- 3) Hasil menunjukkan bahwa *Kontribusi PKB (X3)* tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi *Kontribusi PKB (X3)* sebesar $0,932 < 0,05$.
- 4) Hasil menunjukkan bahwa *Kontribusi BBNKB (X4)* tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi *Kontribusi BBNKB (X4)* sebesar $0,546 < 0,05$.

Uji F

Tabel 8 Hasil Uji F Simultan

Deskripsi	Nilai	Standart	Keterangan
Nilai Signifikansi	0.000	< 0,05	Berpengaruh Secara Simultan

Sumber : Data Diolah 2023.

Menurut tabel diatas nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai nilai signifikansi. (0.000) < taraf signifikansi (0.05), hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel independen (*Efektivitas PKB*, *Efektivitas BBNKB*, *Kontribusi PKB* dan *Kontribusi BBNKB*) secara bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen, PAD.

Interpretasi

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui Efektivitas PKB (X1) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi Efektivitas PKB (X1) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hal tersebut dapat dijalskan dengan adanya PKB yang efektif tentunya akan sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli yang diterima oleh daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan asli daerah. Pemutihan pajak yang dilakukan setiap tahun menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pajak, di mana pemberian insentif berupa penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan pajak bertujuan mendorong pemilik kendaraan bermotor agar membayar pajak secara tertib. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas PKB berpengaruh terhadap PAD periode 2020-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shofiatul (2021) menjelaskan bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui Efektivitas BBNKB (X2) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi Efektivitas BBNKB (X2) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas BBNKB berpengaruh terhadap PAD periode 2020-2022.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penerapan pajak progresif yang diberlakukan oleh pemerintah. Pajak progresif pada BBNKB, yang memberlakukan tarif yang meningkat seiring dengan nilai kendaraan, mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi pajak yang lebih besar ketika memiliki kendaraan dengan nilai lebih tinggi. Kebijakan ini tidak hanya berdampak positif terhadap penerimaan PAD, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam melakukan pembalikan nama atas kendaraan bermotor yang dimiliki. Sehingga Dapat diketahui dengan Adanya BBNKB yang meningkat turut meningkatkan pula pendapatan asli yang dimiliki oleh daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shofiatul (2021) menjelaskan bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui Kontribusi PKB (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi Kontribusi PKB (X3) sebesar 0,932 $> 0,05$.

Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan bagi daerah, akan tetapi kontribusi Pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor saja. Daerah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak-pajak lainnya seperti pajak kos-kosan, reklame, hotel, restoran, dan sebagainya. Pajak-pajak tersebut juga berperan signifikan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah, dan adanya diversifikasi sumber pendapatan membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, Miftahul (2018) yang mendapatkan hasil kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kurang berkontribusi terhadap PAD.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui Kontribusi PKB (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Kontribusi BBNKB memperoleh nilai signifikasni $0,589 > 0,05$ sehingga diketahui bahwa Kontribusi BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD.

Meskipun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu sumber pendapatan bagi daerah, akan tetapi kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor saja. Daerah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak-pajak lainnya seperti pajak kos-kosan, reklame, hotel, restoran, dan sebagainya. Pajak-pajak tersebut juga berperan signifikan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah, dan adanya diversifikasi sumber pendapatan membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, Miftahul (2018) yang mendapatkan hasil kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kurang berkontribusi terhadap PAD.

Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uji F nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak, sehingga diketahui bahwa Efektivitas PKB, Efektifitas BBNKB, Kontribusi PKB dan Kontribusi BBNKB berpengaruh secara simultan atau bersama sama terhadap PAD. Nilai adjusted R Square sebesar 1 atau 100%, berarti Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi sebesar 100% oleh variabel Efektivitas PKB, Efektifitas BBNKB, Kontribusi PKB dan Kontribusi BBNKB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2020-2022. Kontribusi PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, kontribusi BBNKB juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan, efektivitas PKB, efektivitas BBNKB, kontribusi PKB, dan kontribusi BBNKB secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Hasil evaluasi efektivitas PKB dan BBNKB selama tiga tahun terakhir menunjukkan keefektifan yang baik, dengan nilai melebihi 100%. PKB pada tahun 2020 hingga 2022 mencapai efektivitas sebesar 115,84%, 105,42%, dan 111,44%, sementara BBNKB mencapai efektivitas masing-masing sebesar 119,47%, 122,14%, dan 119,48%. Evaluasi kontribusi PKB dan BBNKB menunjukkan kontribusi yang baik, dengan nilai melebihi 50%. PKB pada tahun 2020 hingga 2022 mencapai kontribusi sebesar 70,34%, 66,86%, dan 69,37%, sementara BBNKB mencapai kontribusi masing-masing sebesar 29,12%, 32,51%, dan 30,08%.

Sebaiknya KB Samsat Katang Kediri terus meningkatkan dan mempertahankan keefektifan PKB dan BBNKB melalui program program yang dimiliki seperti pemutihan dan lainnya, hal tersebut berguna mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mensejahterakan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. 2013. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik.
- Bensaadi, Adnan, And Myra Salsabila. 2021. "Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019." 6(2): 142-49.
- Evi, Purnamawati. 2021. "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah." *Solusi* 19(1): 12-24.
- Jurnal Akuntansi Unesa, 1(2), 1-19. Affandi, A., & Nasional, D. P. (2008).

Efektifitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Bersama Samsat Mojokerto Melalui Samsat Link.
Malang: Universitas Brawijaya.

- Khoiriyah, Nurul, And Ayu Fury Puspita. 2020. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* 9(1): 1–13.
- Kumalasari, Devin, Khasanah Sahara, And Marhendra Kusuma. 2017. *Efektivitas Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Nganjuk*.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: C.V Andi.
- Rizal, Yani, And Miftahul Hidayah. 2018. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Samsat Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 9(1): 84–91.
- Sadya, Sarnita. 2023. "Polri Catat 152,51 Juta Kendaraan Di Indonesia Pada 2022." *DataIndonesia.Id*. <https://DataIndonesia.Id/Sektor-Riil/Detail/Polri-Catat-15251-Juta-Kendaraan-Di-Indonesia-Pada-2022> (February 18, 2023).
- Saleh, H, And F Menne. 2021. *Bapenda_Jabar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://Bapenda.Jabarprov.Go.Id/Pajak-Kendaraan-Bermotor/>. Sari, Tri Mustika. 2013. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah." *Dokumen Karya Ilmiah* 1: 3–4.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Serta R&D*.:Alfabeta.
- Suprianto, Dicky, And Raisa Pratiwi. 2017. "Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 – 2016." *Stie Multi Data Palembang*: 1–15.
- Sofyan. 2016. "Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bogor." *Jurnal Eksekutif* 13(1): 65–66. <https://Jurnal.Ibmt.Ac.Id/Index.Php/Jeksekutif/Article/View/107%0ahttps://Jurnal.Ibmt.Ac.Id/Index.Php/Jeksekutif/Article/Download/107/105>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.(2022).
- Zain, Rifky Maulana. 2016. "Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Strategi Penetapan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep)." : 1–23.